BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dimasa sekarang ini pemerintah dituntut dalam melaksanakan fungsinya secara transparan dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*), sehingga dibutuhkan adanya aparatur pemerintah yang berintegritas, objektivitas, kompeten, independen dan sistem pengendalian intern yang baik guna mengawasi, mengevaluasi dan menjamin kinerja pemerintahan agar tugas dan fungsinya terlaksana dengan baik serta kebijakan - kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara ekonomis, efektif, efisien, bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat yang melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara yang melakukan pengawasan intern melalui review, audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dengan berjalannya waktu dan tuntutan yang dihadapi, APIP sekarang ini diharapkan bukan hanya bisa menyalahkan (*watchdog*) tetapi lebih kearah pendampingan (*consulting*). APIP merupakan salah satu unsur manajemen

pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Dengan adanya perubahan fungsi tersebut diperlukan adanya pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dimana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Semakin banyak orang yang menuntut agar sektor publik bertanggung jawab atas kualitas pemerintahan yang baik di Indonesia. Tuntutan ini wajar karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa buruknya pemerintahan dan birokrasi yang buruk adalah penyebab krisis ekonomi di Indonesia (Sunarsip, 2001).

Pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan adalah tiga komponen utama yang mendukung pembentukan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mardiasmo, 2005). Pengawasan adalah upaya pihak di luar eksekutif, seperti masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memantau kinerja pemerintahan. Mekanisme yang digunakan oleh eksekutif untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan manajemen dijalankan dengan benar sehingga tujuan organisasi dapat dicapai adalah pengendalian. Namun, pemeriksaan, juga dikenal sebagai audit, adalah

tindakan yang dilakukan oleh individu yang independen dan memiliki kompetensi profesional untuk mengevaluasi apakah hasil kinerja pemerintah telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Auditor harus berperilaku dengan integritas, objektivitas, dan kompetensi. Agar auditor dapat melakukan audit secara jujur dan tegas, integritas diperlukan. Obyektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa terpengaruh oleh tekanan atau permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil audit. Selain itu, auditor harus memiliki kompetensi yang didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas (Sukriah et al., 2009).

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan auditor internal Bupati yang sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mendampingi Bupati dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan dan meyakini operasional pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kab. Pati sangat diharapkan independen dari pengaruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melakukan koordinasi dengan aparatur pemerintah yang terkait dalam melaksanakan pengawasan agar terdapat keterpaduan dan saling

memfasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati juga manusia. Auditor bisa saja mengalami suatu kondisi yang membuat ia menjadi malas, acuh, atau ceroboh. Tapi auditor internal bukan manusia biasa. Dalam pekerjaannya, auditor internal dituntut untuk bersikap profesional dan taat kepada kode etik profesi. Kepatuhan terhadap kode etik berperan penting dalam menjaga kredibilitas profesi auditor internal dari ancaman risiko tinggi. Risiko itu terjadi karena sifat pekerjaan pemeriksa berpeluang besar menghadapi situasi dilematis seperti konflik kepentingan, intervensi atau ancaman dari pihak yang diperiksa, atau bahkan tawaran kerja sama untuk berbuat curang (*kolusi*) antara auditor dengan Auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemeriksaan pengawasan internal, salah satunya dugaan suap yang dilakukan Bupati Bogor Ade Yasin dibantu 3 anak buahnya kepada 4 auditor BPK perwakilan Jawa Barat (<https://nasional.kompas.com>) dan juga kasus pada Empat Auditor BPK RI yang terungkap menerima suap Rp 2,9 miliar dari 12 kontraktor di Sulawesi Selatan (<https://www.detik.com>). BPK memang memiliki kode etik, tapi penegakan hingga *punishment* tidak berjalan dengan baik, pengawasan internal yang dimiliki oleh BPK gagal menjalankan fungsinya sehingga kasus suap yang melibatkan auditor BPK selalu terulang. Padahal, BPK adalah salah satu lembaga yang mestinya

menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mau menerima suap hanya dengan tujuan memoles laporan keuangan pemerintah daerah hingga kementerian atau lembaga negara supaya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sebagai sebuah profesi, auditor internal telah memiliki asosiasi profesi yang diakui secara luas keberadaannya yaitu *The Institute of Internal Auditors (IIA)*. Asosiasi inilah yang berperan merumuskan kode etik profesi para auditor internal yang menjadi anggotanya. Kode etik termasuk salah satu *mandatory guidance* dalam *International Professional Practices Framework IIA*. *Mandatory guidance* lainnya adalah prinsip dasar, definisi, dan standar audit internal. Menurut IIA, kode etik merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Kode etik tersebut merupakan syarat dan harapan minimal. Tujuan IIA mengatur kode etik adalah untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesi audit internal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah Integritas, Berdasarkan Kode Etik Aparat Intern Pemerintah Indonesia, Integritas akan membangun kepercayaan terhadap auditor internal sehingga dapat memberikan dasar keyakinan atas penilaian yang dilakukannya. Auditor internal harus melaksanakan pekerjaan secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab, harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai ketentuan hukum atau profesi, tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal

atau organisasi, harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis. Studi Ahmad Daud (2017) tentang Pengaruh Kompetensi, Integritas, dan Objektivitas Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung) menemukan bahwa integritas auditor internal pemerintah memengaruhi kualitas hasil audit.

Sedangkan Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah objektivitas. Berdasarkan Kode Etik Aparat Intern Pemerintah Indonesia, objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dapat dipengaruhi opini dan pertimbangan individu atau golongan dalam mengambil suatu tindakan. Auditor internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian secara adil, termasuk kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi, tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya, harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu. Hasil penelitian Harvita Yulian Ayuningtyas, Sugeng Pamudji (2012) Studi Kasus pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, objektivitas memengaruhi kualitas hasil audit.

Pengetahuan audit adalah pemahaman auditor dalam melakukan proses auditnya secara efektif. Auditor internal hanya terlibat dalam pemberian layanan yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan

pengalaman yang dimilikinya, harus memberikan layanan audit internal sesuai dengan standar praktik profesional audit internal, harus senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas layanannya secara berkelanjutan. Hasil penelitian Trio Novaldi, Karona Cahya Susena, Yun Fitriano (2023) tentang Pengaruh Kompetensi Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Aparatur Pengawas Inspektorat Kabupaten Seluma, menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menemukan terdapat pengaruh antara kompetensi terhadap kualitas audit.

Peneliti menggunakan kombinasi variabel-variabel independen dari penelitian sebelumnya untuk melihat bagaimana hal itu berdampak pada meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan auditor intern pemerintah. Penelitian tentang kualitas audit sangat penting karena mereka dapat mengetahui apa yang mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor internal dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas audit yang mereka buat. Tidak mudah untuk menjaga integritas, obyektifitas, dan kemampuan auditor, jadi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana integritas, obyektifitas, dan kemampuan auditor berdampak pada kualitas hasil kerja auditor intern. Sejauh mana auditor pemerintah dapat terus menjaga kualitas layanan auditnya sangat penting untuk penelitian ini.

Terkait dengan banyak topik yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ahmad Daud (2017). Penelitian kali ini ada beberapa kesamaan, diantaranya bahwa penelitian ini menggunakan variabel yang sama pada peneliti sebelumnya

yaitu variabel integritas, obyektifitas serta kompetensi dan kualitas hasil kerja auditor. Namun perbedaan pada penelitian ini terdapat pada survei penelitiannya. Penelitian sebelumnya berada di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, sedangkan penelitian saat ini berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Alasan peneliti memilih Inspektorat Daerah Kabupaten Pati karena Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menjadi saran kepada Kepala Daerah khususnya Bupati Pati guna mengambil kebijakan dan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Sedangkan kualitas hasil kerja auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah integritas, obyektifitas serta kompetensi serta etika kepatuhan mereka terhadap kode etik.

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk melihat pengaruh integritas, objektivitas, dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terhadap kualitas audit, maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu "PENGARUH INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS HASIL KERJA AUDITOR INTERNAL (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati)"

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan Integritas, Objektivitas Dan

Kompetensi Auditor Intern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, yang secara langsung mempengaruhi Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati?
2. Apakah Objektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Integritas, Objektivitas Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati) bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Integritas terhadap kualitas hasil kerja auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
2. Menganalisis pengaruh Objektivitas terhadap kualitas hasil kerja auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
3. Menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap kualitas hasil kerja auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Berikut ini adalah manfaat teoretis dari integritas, objektivitas, dan kemampuan auditor terhadap kualitas hasil kerja auditor internal (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati):

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan teori akuntansi di Indonesia, khususnya di bidang auditing, yang membahas tentang integritas, objektivitas, dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil kerja auditor internal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca tentang masalah ini dan dapat digunakan sebagai referensi, diskusi, dan bahan penelitian lanjutan bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Berikut ini adalah manfaat nyata dari hubungan antara Integritas, Objektivitas, dan Kompetensi Auditor dengan Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati khususnya mengenai pentingnya Integritas, Objektivitas Dan Kompetensi Auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor internal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak auditor internal untuk meningkatkan kualitas auditnya.